



CORE Insight

BIAYA MAHAL NEGOSIASI TARIF

Kutipan

Semua konten dalam publikasi yang dikeluarkan oleh CORE Indonesia dapat dikutip secara bebas selama mencantumkan sumber

POIN UTAMA:

- Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) diproyeksikan mengalami penurunan sebesar USD 9,23 miliar akibat penerapan tarif Trump. Sektor pakaian jadi mengalami penurunan terbesar (USD 2,1 miliar), diikuti sektor manufaktur lainnya (USD 1,5 miliar), dan produk kulit (USD 1,3 miliar). Secara keseluruhan, ekspor Indonesia ke pasar global diprediksi mengalami penurunan sebesar -2,65%, lebih dalam dibandingkan Malaysia (-1,18%), Filipina (-1,69%), dan Thailand (-0,49%).
- Penerapan tarif resiprokal diperkirakan akan menurunkan kesejahteraan nasional Indonesia sebesar -USD 3,16 miliar dan memperlambat pertumbuhan ekonomi menjadi 4,77%. Surplus perdagangan Indonesia berpotensi menyusut hingga USD 4,41 miliar.
- Meskipun tarif resiprokal Indonesia turun menjadi 19%, tarif total produk Indonesia ke AS tetap tinggi. Contohnya, sepatu Indonesia akan dikenai tarif total 31% (12% tarif dasar + 19% tarif resiprokal), dan jika Indonesia bergabung BRICS, bisa mencapai 41% dengan tambahan tarif 10%.
- Indonesia menghadapi potensi lonjakan impor dari Tiongkok sebesar USD 17,47 juta akibat *trade diversion*, sementara AS tengah mengalami krisis pertanian dengan kebangkrutan petani kecil melonjak 57% dan mencapai 173 kasus pada semester 1 2025. Ekspor kedelai AS ke Tiongkok merosot rata-rata -15% dalam dua tahun terakhir, sedangkan ekspor jagung AS ke Tiongkok anjlok -74% pada 2023-2024, membuat AS mencari pasar alternatif termasuk Indonesia.
- CORE mendorong pemerintah segera menegosiasikan ulang tarif resiprokal beserta berbagai beban yang harus ditanggung Indonesia. Pemerintah perlu meninjau ulang kewajiban untuk menghapus hambatan non-tarif barang dari AS, perlu fokus untuk mendorong AS memberi kompensasi berupa investasi yang memperkuat industri manufaktur dalam negeri, dan perlu melindungi usaha tani di dalam negeri.

1. Pendahuluan

Pada 22 Juli 2025, Gedung Putih merilis [detail](#) kesepakatan tarif resiprokal antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia. Dalam perjanjian ini, AS sepakat menurunkan tarif resiprokal untuk Indonesia dari 32% menjadi 19%, sementara Indonesia berkewajiban menghapus 99% tarif atas produk asal AS. Pemerintah Indonesia memandang hasil ini sebagai “perjuangan yang luar biasa” dan mengklaimnya sebagai “kemenangan” karena berhasil memperoleh tarif 19%, yang disebut sebagai tarif terendah di antara negara-negara ASEAN.

Namun, CORE menilai detail kesepakatan yang dipublikasikan Gedung Putih justru menunjukkan biaya negosiasi yang sangat mahal bagi Indonesia. Menurut CORE, kerugian muncul dalam tiga aspek utama: (1) ekspor Indonesia ke AS diperkirakan berkurang hingga USD 9,23 miliar; (2) kewajiban menghapus berbagai hambatan non-tarif yang berpotensi melemahkan industri manufaktur domestik; dan (3) ketimpangan komitmen yang berpotensi merugikan pelaku industri lokal.

Bagi Indonesia, penerapan tarif resiprokal diperkirakan menurunkan kesejahteraan nasional sebesar -USD 3,16 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya konsumsi ekspor Indonesia di pasar AS, yang memangkas surplus produsen, khususnya pada produk-produk utama yang diekspor ke AS. Dampak ini juga tercermin pada perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,77 persen, disinyalir akibat penurunan ekspor. **Melemahnya aktivitas ekonomi berpotensi menekan daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor padat karya yang bergantung pada pasar ekspor AS.**



Menurut CORE, kerugian muncul dalam tiga aspek utama: (1) ekspor Indonesia ke AS diperkirakan berkurang hingga USD 9,23 miliar; (2) kewajiban menghapus berbagai hambatan non-tarif yang berpotensi melemahkan industri manufaktur domestik; dan (3) ketimpangan komitmen yang berpotensi merugikan pelaku industri lokal.

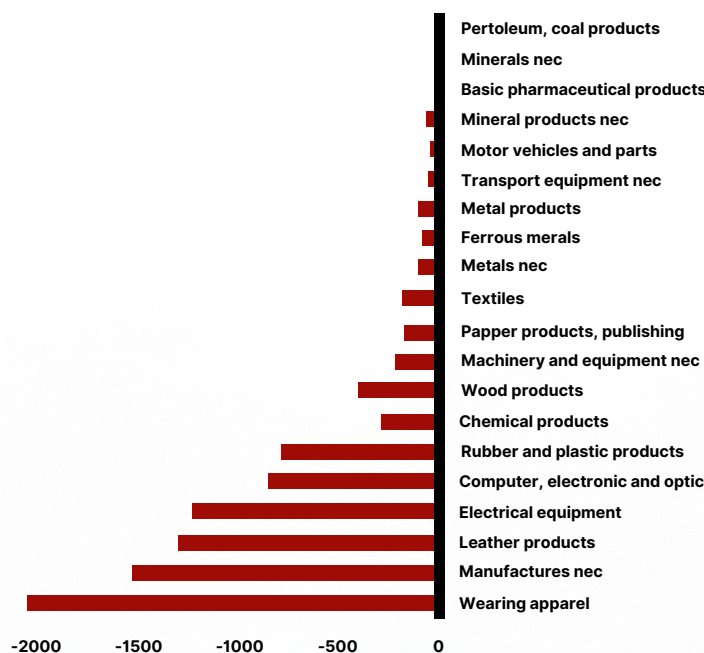
2. Hasil Negosiasi Tak Membuat Ekspor Lebih Berdaya Saing

A. Ekspor Indonesia ke AS akan Berkurang hingga USD 9,23 Miliar

Simulasi CORE menunjukkan potensi kerugian ekspor Indonesia ke AS sebesar USD 9,23 miliar imbas tarif resiprokal. Industri pakaian jadi diprediksi paling terpukul, dengan potensi penurunan ekspor hingga USD 2,1 miliar. Produk seperti *t-shirt* dan jaket buatan Indonesia terancam kalah bersaing dari negara lain.

Sektor barang manufaktur lainnya ikut terdampak, dengan potensi penurunan sebesar USD 1,5 miliar. Produk-produk rumah tangga, aksesoris, dan mainan yang selama ini diekspor ke AS bisa kehilangan daya saing karena harga jual naik. Produk kulit, termasuk sepatu dan tas, diproyeksikan turun USD 1,3 miliar, menyusul tarif tinggi yang menekan margin produsen.

Industri peralatan elektronik dan komputer masing-masing terancam kehilangan USD 1,2 miliar dan USD 0,8 miliar. Padahal, sektor ini merupakan bagian penting dari ekspor berbasis teknologi Indonesia. Sementara itu, produk karet dan plastik, seperti ban dan kemasan, juga menghadapi risiko penurunan sebesar USD 0,7 miliar.



Grafik 1. Simulasi Penurunan Produk Ekspor Indonesia ke AS
Sumber: CORE Indonesia

Secara keseluruhan, implementasi tarif resiprokal akan menurunkan ekspor Indonesia ke pasar global sebesar -2,65%. Penurunan ekspor Indonesia ini lebih dalam dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebagai perbandingan, ekspor Malaysia turun 1,18%, Filipina -1,69%, Thailand -0,49%, bahkan Vietnam masih mencatatkan pertumbuhan ekspor 0,20%. Penurunan ini turut berdampak pada surplus perdagangan Indonesia, yang berpotensi menyusut hingga USD 4,41 miliar.

A. Tarif Naik, Biaya Tinggi: Ekspor Indonesia Tertekan di Pasar AS

Penurunan ekspor tidak terlepas dari tambahan tarif yang dikenakan ke produk ekspor Indonesia. Berbeda dari narasi yang beredar, tarif ekspor Indonesia ke AS justru tetap naik. Kenaikan ini berasal dari akumulasi tarif resiprokal dan tarif dasar yang sebelumnya sudah berlaku. Tarif resiprokal sendiri adalah pungutan tambahan seperti pajak dan biaya lain di luar bea masuk, yang dikenakan secara spesifik dan lebih tinggi pada barang impor dari sejumlah negara.

Indonesia sebenarnya masih cukup kompetitif dibanding Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Sebagai contoh, Tabel 1, yang merangkum tujuh produk unggulan ekspor Indonesia ke AS, menunjukkan bahwa produk alas kaki dan sepatu Indonesia (kode HS: 64) dikenai tarif 12%. Maka, tarif akhir yang akan diterima oleh produk alas kaki dan sepatu Indonesia di pasar AS setelah pemberlakuan tarif resiprokal adalah **12% + 19% = 31%**, sementara Vietnam berpotensi terkena tarif total 32%, Filipina (31%), dan Malaysia (31%).

Begitu juga untuk produk elektronik, tarif total Indonesia hanya 19% (0% tarif saat ini + 19% tarif resiprokal), lebih rendah dibanding Vietnam dan Malaysia yang masing-masing dikenai 21% dan 20%. Untuk produk lain seperti pakaian, alas kaki, minyak nabati, karet, dan mebel, tarif Indonesia juga relatif unggul dibanding Vietnam dan setara dengan Filipina dan Malaysia (lihat Tabel 1).

	Indonesia ^a		Vietnam		Filipina		Malaysia	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ekspor Unggulan ke Amerika Serikat	Tarif Saat ini	Tarif Total ^b	Tarif Saat ini	Tarif Total ^b	Tarif Saat ini	Tarif Total ^b	Tarif Saat ini	Tarif Total ^b
Alat Elektronik (HS 85)	0	19	1	21	0	19	1	20
Produk Pakaian (HS 61)	14	33	14	34	14	33	14	33
Alas Kaki & Pelindung Kaki (HS 64)	12	31	12	32	12	31	12	31
Produk Pakaian Non-Rajut (HS 62)	11	30	11	31	11	30	11	30
Minyak Nabati & Hewani (HS 15)	3	22	3	23	3	22	3	22
Produk Karet (HS 40)	1	20	2	22	0	19	2	21
Mebel & Alas Tidur (HS 94)	0	19	1	21	0	19	1	20

Tabel 1. Simulasi Tarif Total yang Akan Diterima oleh Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Malaysia

Catatan: (1) ^a) Tarif total Indonesia berpotensi ketambahan 10% lagi akibat bergabung dengan BRICS; (2) ^b) Tarif total adalah tarif saat ini + tarif resiprokal masing-masing negara.

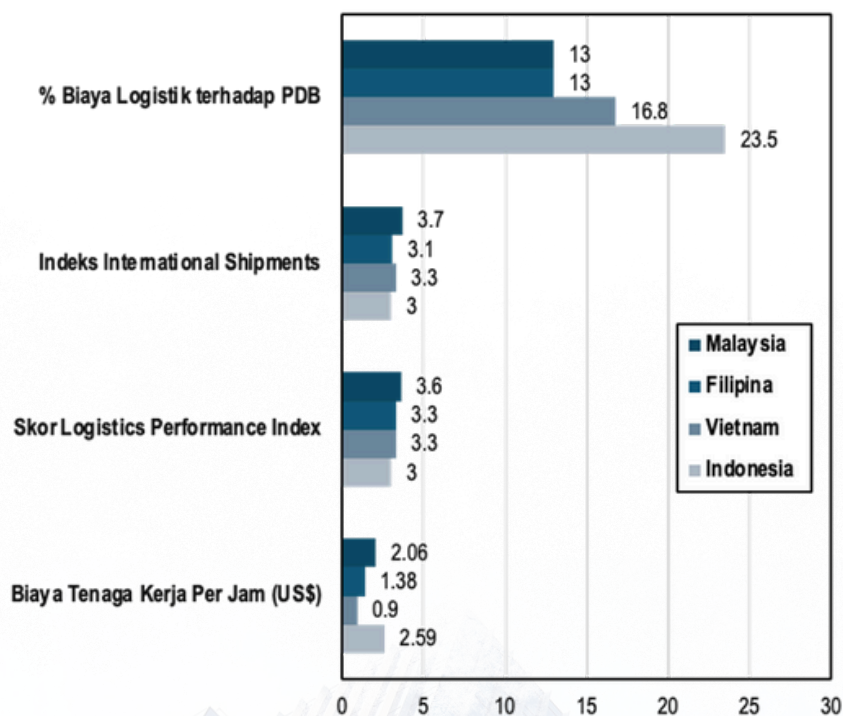
Sumber: Laman *Trademap* (diolah)

Sekilas tarif total untuk Indonesia ini menguntungkan. Namun, sebagai anggota penuh BRICS, Indonesia masih berisiko dikenai tambahan tarif 10%, yang akan menggerus daya saing ekspor Indonesia dibandingkan negara lain.

Misalnya, produk elektronik Indonesia berpotensi menanggung tarif hingga sebesar 29%, jauh lebih tinggi dari tarif produk elektronik Vietnam yang hanya 21%, Filipina (19%), dan Malaysia (20%). Begitu juga untuk produk alas kaki dan sepatu Indonesia, total tarifnya bisa mencapai 41%!

Namun begitu, walaupun Indonesia tidak bergabung dengan blok BRICS, produk ekspor Indonesia juga sebetulnya berpotensi kalah saing dengan produk asal Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Sebab, biaya produksi dan biaya logistik di Indonesia jauh lebih mahal. Grafik 1 menunjukkan, biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% dari total PDB Indonesia, sedang Vietnam hanya berkisar 16,8%, Filipina (13%), dan Malaysia (13%). Tingginya persentase biaya logistik Indonesia ini juga tercermin dari skor *Logistics Performance Index* (LPI) dan komponen *International Shipments Score* (ISS) yang keduanya memiliki nilai lebih kecil ketimbang skor Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Semakin kecil nilai LPI dan ISS, semakin mahal biaya untuk mengirim barang dari suatu negara ke pasar internasional.

Dari sisi biaya produksi di sektor industri manufaktur, biaya tenaga kerja di Indonesia juga berstatus lebih mahal ketimbang biaya tenaga kerja di Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Di Indonesia, pekerja di kawasan industri manufaktur di kawasan Jakarta dan sekitarnya menerima upah kira-kira USD 2,59 per jam, sementara di Vietnam, Filipina, dan Malaysia masing-masing hanya USD 0,9, USD 1,38, dan USD 2,06 per jam. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa biaya produksi industri manufaktur, khususnya input tenaga kerja, di Indonesia lebih tinggi ketimbang biaya produksi di Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Tingginya biaya produksi ini akan menimbulkan selisih harga untuk produk yang diekspor Indonesia ke pasar AS, dibandingkan dengan produk dari ketiga negara tersebut.



Grafik 1. Perbandingan Biaya Produksi Industri Manufaktur dan Biaya Logistik di Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Malaysia

Catatan: (1) Semakin rendah nilai *Logistics Performance Index* dan *Internasional Shipments Score*, semakin mahal biaya logistik di masing-masing negara; (2) Data biaya tenaga kerja per jam di Indonesia adalah angka DKI Jakarta tahun 2023.
Sumber: BPS; *Logistics Performance Index 2023*; PwC, *Vietnam Investment Review*; Kompas.

Penurunan ekspor bisa juga dijelaskan dari sisi permintaan (*demand side*) di AS. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pengenaan tarif resiprokal akan menyebabkan inflasi di AS sekitar 7%. Inflasi tersebut akan menurunkan *purchasing power* (daya beli) konsumen sehingga permintaan terhadap produk-produk yang berbasis kebutuhan sekunder akan menurun termasuk permintaan terhadap produk garmen, pakaian, dan alas kaki yang menjadi ekspor utama Indonesia ke AS.



Ancaman gelombang alih ekspor ini tidak hanya dari Tiongkok, melainkan juga dari negara lainnya. Vietnam dengan ekspor USD 100 miliar berpotensi mengalihkan USD 1–1,5 miliar produk garmen, sepatu, dan furnitur ringan.

3. Buah Negosiasi Tarif: Lonjakan Impor Membuat Industri Dalam Negeri Babak Belur

Joint statement yang dirilis oleh Gedung Putih secara gamblang menegaskan, Amerika Serikat ingin menempatkan Indonesia sebagai pasar ekspor strategis untuk berbagai produk industri dan pertanian AS. Tarif resiprokal adalah instrumen yang dipakai AS untuk memaksa Indonesia membuka pasarnya. Bagi Indonesia tentu saja ambisi AS ini adalah malapetaka di tengah kenyataan bahwa produk Tiongkok juga tengah membanjiri Indonesia.

Kebijakan tarif resiprokal AS terhadap Tiongkok berpotensi mempercepat limpahan barang murah ke Indonesia, memperbesar tekanan bagi industri manufaktur di dalam negeri yang sejak satu dekade terakhir sudah kewalahan bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Situasi seperti ini menempatkan Indonesia pada situasi yang sulit: diminta membuka pasar untuk AS, sedang tekanan dari Tiongkok belum sepenuhnya tertangani.

A. Ancaman Gelombang Impor dari Berbagai Negara

Secara sektoral, volume impor dari Tiongkok terus meningkat, dengan gas mencatatkan lonjakan tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Berdasarkan simulasi CORE, dampak dari *trade diversion* mendorong potensi meningkatnya impor Indonesia dari Tiongkok sebesar 17,47 juta USD, dengan gas sebagai komoditas paling dominan, sementara sejumlah sektor lainnya justru menurun.

Pola ini mencerminkan kecenderungan ketergantungan terhadap pasokan energi dan bahan baku strategis dari Tiongkok. **Seiring bergabungnya Indonesia ke blok BRICS, impor Indonesia dari Tiongkok diperkirakan akan terus tumbuh, terutama untuk produk kayu, gas, peralatan transportasi, daging, produk makanan, dan otomotif.**

Ancaman gelombang alih ekspor ini tidak hanya dari Tiongkok, melainkan juga dari negara lainnya. Vietnam dengan ekspor USD 100 miliar berpotensi mengalihkan USD 1–1,5 miliar produk garmen, sepatu, dan furnitur ringan, yang berpotensi menekan industri tekstil di dalam negeri. Jepang dengan ekspor USD 140 miliar memiliki potensi alih ekspor sebesar USD 0,7–1,4 miliar untuk produk mesin, kendaraan, dan elektronik konsumen. Thailand dengan ekspor USD 60 miliar berpotensi mengalihkan USD 0,6–1,2 miliar produk otomotif dan barang konsumen. Sementara India dengan ekspor USD 80 miliar berpotensi mengalihkan USD 0,4–0,8 miliar produk tekstil dan farmasinya, yang dapat memicu lonjakan impor tekstil dan obat-obatan di Indonesia.

B. Konsekuensi Menghapus Kebijakan Non-Tarif

Ancaman lain yang mengintai adalah upaya memuluskan berbagai produk manufaktur dan pertanian AS ke pasar Indonesia. Secara terperinci, **tercatat sedikitnya ada 18 kebijakan non-tarif yang harus dihapus atau ditinjau ulang oleh Indonesia untuk memuluskan penetrasi produk AS ke pasar Indonesia, antara lain kebijakan inspeksi, pelabelan, sertifikasi, kewajiban TKDN, lisensi impor, dan pengawasan.** Penghapusan kebijakan inspeksi pra-pengapalan (*pre-shipment inspection*), sertifikasi, dan pelabelan ini akan berdampak langsung pada industri jasa pemastian (*testing, inspection, and certification, TIC*) yang selama ini menjadi tulang punggung pengawasan mutu produk impor Indonesia.

Industri jasa pemastian ini memiliki peran strategis dalam melindungi kepentingan nasional, tidak hanya memastikan produk yang masuk memenuhi standar kesehatan dan keselamatan konsumen Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen kedaulatan dalam mengendalikan arus barang impor sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Tanpa mekanisme inspeksi dan sertifikasi yang ketat, Indonesia kehilangan kemampuan untuk melindungi konsumen dari produk sub-standar, memverifikasi klaim kualitas, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Hal ini tidak hanya mengancam keberlanjutan bisnis industri jasa pemastian, tetapi juga melemahkan kapasitas nasional dalam pengawasan standar mutu dan keamanan produk yang beredar di pasar domestik.

Secara spesifik, berbagai penghapusan hambatan non-tarif ini berpotensi menekan kinerja industri kosmetik, farmasi, alat-alat medis, dan berbagai usaha pertanian di sektor pangan. Termasuk, Indonesia berkewajiban menghapus restriksi ekspor untuk komoditas mineral kritis (*critical minerals*) padahal penghiliran sektor tambang adalah program prioritas pemerintah dan berlawanan dengan semangat UU No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang mendorong penghiliran sektor mineral tambang di dalam negeri.

Pengecualian kewajiban memenuhi syarat TKDN bagi perusahaan-perusahaan AS yang investasi di Indonesia berpotensi menimbulkan protes dari para investor lain yang selama ini sudah berusaha memenuhi persyaratan TKDN, dengan membangun pabrik di Indonesia. Terdapat kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan yang berasal dari AS akan hengkang karena kewajiban TKDN tersebut dihapuskan.

“

Tanpa mekanisme inspeksi dan sertifikasi yang ketat, Indonesia kehilangan kemampuan untuk melindungi konsumen dari produk sub-standar, memverifikasi klaim kualitas, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional.

Kesepakatan penghapusan hambatan non-tarif untuk inspeksi dan pelabelan juga mencakup ancaman bagi sertifikasi halal Indonesia. Kosmetik, alat kesehatan, dan produk farmasi AS dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal. Kondisi ini berpotensi membuat konsumen muslim kehilangan jaminan kehalalan produk yang beredar, rawan penipuan dan manipulasi sekaligus menciptakan persaingan tidak seimbang antara produk domestik yang harus memenuhi standar halal dengan produk impor AS yang berpotensi bebas dari kewajiban tersebut.

Indonesia juga wajib memberikan status permanen *Fresh Food of Plant Origin* (FFPO) untuk semua produk tanaman AS dan mengakui otoritas regulasi AS tanpa syarat, termasuk *automatic listing* untuk semua fasilitas daging, unggas, dan susu AS. Kebijakan ini berpotensi membuka pintu bagi membanjirnya produk pertanian AS yang dapat menghancurkan struktur pasar domestik. Dengan status permanen dan *automatic listing*, produk AS tidak lagi perlu melalui evaluasi berkala atau proses verifikasi yang ketat. Hal ini menciptakan jalur masuk yang sangat mudah bagi produk-produk pertanian AS.

Di luar kewajiban menghapus hambatan non-tarif di atas, Indonesia juga harus membeli pesawat, produk pertanian, dan produk energi AS dengan total nilai mencapai USD 22,7 miliar dolar. Padahal, Vietnam dan Filipina yang sudah mencapai kesepakatan dengan AS, dengan masing-masing memperoleh tarif resiprok 20% dan 19% tidak berkewajiban menghapus hambatan non-tarif dan membeli produk AS, melainkan cukup berkewajiban membuka akses pasar untuk produk-produk AS dengan tarif 0%. Dalam situasi seperti ini, **Indonesia tidak hanya babak belur dari sisi tarif, tetapi juga kebijakan non-tarif dan kewajiban komersial.**

				
Tarif Sebelum Negosiasi	32%	46%	20%	25%
Tarif Pasca Negosiasi	19%	20%	19%	19%
Kewajiban terhadap AS	Tarif: Memangkas 99% tarif untuk seluruh produk AS. Hambatan Non-Tarif: - Menghapus kewajiban TKDN. - Menerima sertifikasi FDA untuk alat medis dan obat-obatan. - Menghapus kewajiban label tertentu. - Menghapus seluruh hambatan untuk produk kosmetik, alat medis, dll. - Menghapus restriksi impor lisensi untuk produk manufaktur AS. - Menghapus inspeksi pra-pengiriman atau verifikasi. - Mengecualikan semua lisensi impor untuk produk-produk pertanian AS, termasuk aturan neraca komoditas. - Membolehkan transfer data personal ke AS. - Menghapus larangan ekspor komoditas mineral kritis ke AS. Kesepakatan Komersial: - Pesawat terbang (USD 3,2 miliar) - Produk pertanian (USD 4,5 miliar) - Energi (USD 15 miliar)	Tarif: Tarif 0% untuk seluruh produk AS. Hambatan Non-Tarif: Tidak ada detail kewajiban. Kesepakatan Komersial: Tidak ada detail kewajiban.	Tarif: Tarif 0% untuk seluruh produk AS. Hambatan Non-Tarif: Tidak ada detail kewajiban. Kesepakatan Komersial: Tidak ada detail kewajiban.	Tarif: Menghapus 98,4% tarif untuk seluruh produk AS. Hambatan Non-Tarif: Meninjau ulang beberapa hambatan non-tarif. (Belum terdapat detail). Kesepakatan Komersial: - Akan belanja produk AS senilai USD 150 miliar dalam 5 tahun ke depan, khususnya semikonduktor, peralatan pesawat, dan pusat data. - PETRONAS akan belanja LNG senilai USD 3,4 miliar setahun.
Lainnya:	Tidak ada detail kewajiban.	Lainnya: Membuka akses pasar untuk kendaraan AS.	Lainnya: Memperkuat kerja sama militer.	Lainnya: - Malaysia akan berinvestasi langsung senilai USD 70 miliar di AS. - Produk farmasi dan cip semikonduktor Malaysia akan dikecualikan dari tarif resiprok.

Tabel 2. Perbandingan Kewajiban Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Malaysia dalam Negosiasi Tarif

Catatan: Pemerintah Filipina tidak menghapus tarif untuk berbagai produk pertanian dari AS ketika kesepakatan tarif menjadi 19%.

Sumber: Whitehouse.gov; The Straits Times; Reuters; BBC

C. Krisis Pertanian AS dan Komitmen Pembelian Produk Pertanian

Posisi strategis Indonesia sebagai pintu masuk produk-produk utama pertanian Amerika Serikat di Asia Tenggara membawa implikasi negatif, khususnya bagi keberlanjutan usaha tani sektor pangan di Indonesia. Masuknya jagung dan kedelai impor dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga domestik akan menurunkan insentif bagi petani lokal untuk menanam kedua komoditas tersebut. Padahal pemerintah sudah mencanangkan swasembada untuk komoditas pertanian pokok termasuk jagung dan kedelai.

Sektor pertanian AS kini tengah menghadapi krisis karena pasar global yang tidak menentu akibat perang tarif Trump. Sepanjang 2024–2025, kebangkrutan petani kecil di AS melonjak drastis hingga 57%. Pada semester 1 2025, kasus kebangkrutan petani kecil di AS mencapai 173 kasus, tertinggi sejak 2020 (*Bloomberg*, 24 Juli 2025).

Kebangkrutan petani kecil AS ini salah satunya disebabkan oleh keputusan Tiongkok yang lebih memilih kedelai dan jagung dari Brazil dan Amerika Latin akibat ketegangan dagang (*Bloomberg*, 24 Juli 2025). Kehilangan akses ke pasar Tiongkok menyebabkan kelebihan suplai (*oversupply*) di AS, harga komoditas pertanian anjlok, dan margin keuntungan petani menurun.

Dalam konteks kedelai, keinginan AS melakukan penetrasi ke pasar Indonesia disebabkan pangsa pasar utama kedelai AS, yakni Tiongkok (51,9%) tengah menurunkan pembelian kedelai dari AS dan mengalihkan pembelian impor kedelai dari Brazil dan Argentina. Pertumbuhan ekspor kedelai AS ke Tiongkok terus merosot dalam dua tahun terakhir (2023–2024) dengan rata-rata -15%, sementara impor kedelai Tiongkok dari Brazil meningkat rata-rata 11% sepanjang 2021–2024. Hal yang sama juga terjadi untuk produk jagung. Ekspor AS ke Tiongkok jatuh -74% sepanjang 2023–2024, sedang nilai impor Jagung dari Brazil naik signifikan, dari USD 1 ribu pada 2022 menjadi USD 1,8 miliar pada 2024.

Komitmen Indonesia yang tidak hanya membuka pintu atas produk kedelai dan jagung AS, tetapi juga membelinya tampak lebih sebagai upaya untuk mengatasi surplus produk pertanian AS yang tidak terserap, yang tentu saja lebih menguntungkan AS untuk menyelesaikan masalah internal ketimbang memberikan manfaat bagi Indonesia.



Posisi strategis Indonesia sebagai pintu masuk produk-produk utama pertanian Amerika Serikat di Asia Tenggara membawa implikasi negatif, khususnya bagi keberlanjutan usaha tani sektor pangan di Indonesia.

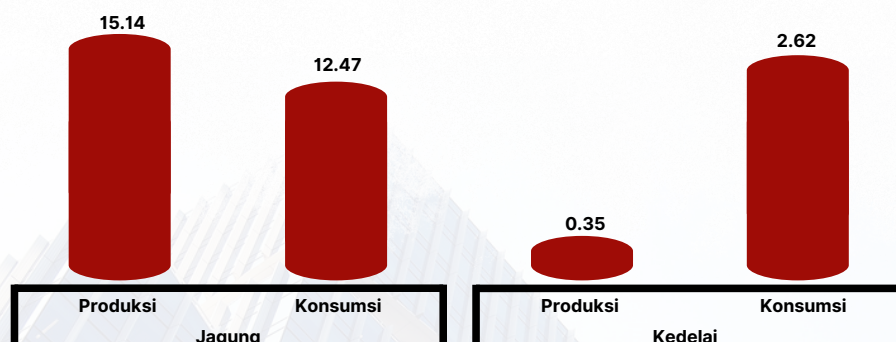
Ironi kembali muncul ketika data menunjukkan, produk pertanian AS tidak selalu kompetitif dari segi harga. Terdapat dilema dalam komitmen pembelian dari AS yang bertentangan dengan prinsip efisiensi ekonomi. Indonesia selama ini banyak mengimpor gandum dari Australia dengan harga USD 262/MT dan Kanada USD 285/MT. Rusia dengan harga gandum USD 228/MT berada di urutan ke-5 sebagai eksportir gandum ke Indonesia. AS sendiri merupakan eksportir keenam terbesar dengan harga USD 233/MT.

Pola serupa terlihat pada jagung, AS adalah eksportir keempat terbesar (USD 194/MT) sementara Argentina sebagai eksportir terbesar hanya menawarkan USD 193/MT. Untuk kedelai, meski AS adalah eksportir terbesar (USD 418/MT), Argentina justru lebih murah, yakni di angka USD 405/MT. **Komitmen pembelian USD 4,5 miliar kepada AS akan membuat Indonesia kehilangan fleksibilitas untuk memilih produk dengan harga yang lebih ekonomis.**

Indonesia kehilangan kesempatan melakukan diversifikasi yang cost-effective, misalnya memaksimalkan impor gandum dari Rusia yang \$5/MT lebih murah dari AS, atau kedelai dari Argentina yang \$13/MT lebih ekonomis. Kebijakan ini pada dasarnya mengorbankan efisiensi alokasi sumber daya dan memberikan subsidi implisit kepada eksportir AS, di mana Indonesia harus membayar lebih mahal. Komitmen ini berpotensi meningkatkan biaya produksi untuk industri makanan dan pakan ternak domestik.

Situasi ini semakin kompleks karena Indonesia saat ini mengalami surplus produksi jagung. Pada 2024, produksi jagung Indonesia mencapai 15,14 juta ton, sedang kebutuhan konsumsi jagung domestik hanya 12,47 juta ton (Grafik 3). Sementara itu, untuk kedelai, produksi domestik hanya mampu memasok 13% dari total konsumsi kedelai. Di sisi lain, dari total 2,67 juta ton kedelai impor pada 2024, sebanyak 88% dipasok oleh petani kedelai AS. Meskipun proporsi impor kedelai dari AS tampak besar, *share*-nya terus menurun sejak 2017, yang mengindikasikan turunnya ketergantungan Indonesia terhadap produsen kedelai AS.

Maka itu, pemerintah Indonesia harus jeli membaca konteks AS yang meminta Indonesia membuka akses pasar produk pertaniannya. Jangan sampai karena alasan defisit kedelai di dalam negeri, Indonesia mengorbankan petani kecil terutama petani jagung yang kini sudah surplus.



Grafik 3. Volume Produksi dan Konsumsi Komoditas Kedelai dan Jagung di Indonesia (Juta Ton)

Catatan: (1) Jagung: data tahun 2024; (2) Kedelai: data tahun 2023. Konsumsi = produksi + impor.

Sumber: BPS

Revitalisasi berbagai infrastruktur irigasi dan pengembangan benih berkualitas tinggi (rekayasa genetika) untuk petani, sangat berpotensi mendorong kenaikan produktivitas kedelai domestik dan mengulang swasembada kedelai sebagaimana yang berhasil pada 1970'an.

Semangat swasembada kedelai hanya akan menjadi angin lalu jika kedelai AS semakin kencang masuk ke pasar domestik. Beberapa juta petani yang masih bertahan memproduksi 349 ribu ton kedelai pada 2023, jumlahnya diperkirakan akan semakin berkurang pada tahun ini dan ke depan.

Lebih dari itu, komitmen semacam ini juga menciptakan kontradiksi antara retorika kemandirian pangan yang digaungkan pemerintah dan realitas ketergantungan struktural terhadap impor dari AS. Indonesia kehilangan fleksibilitas dalam memilih pemasok berdasarkan efisiensi harga, dan terpaksa mengalokasikan devisa untuk produk-produk yang sebenarnya bisa diperoleh lebih murah dari negara lain.



Semangat swasembada kedelai hanya akan menjadi angin lalu jika kedelai AS semakin kencang masuk ke pasar domestik. Beberapa juta petani yang masih bertahan memproduksi 349 ribu ton kedelai pada 2023, jumlahnya diperkirakan akan semakin berkurang pada tahun ini dan ke depan.

4. Rekomendasi

Kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang saat ini masih berbentuk *joint statement* akan menjadi dasar perundingan lebih lanjut, dengan rincian yang akan dituangkan dalam sebuah *agreement* resmi. Oleh karena itu, CORE merekomendasikan sejumlah langkah strategis agar Indonesia dapat mengoptimalkan posisinya dalam proses perundingan dan implementasi kesepakatan tersebut:

Pertama. Pemerintah perlu meninjau ulang kewajiban untuk menghapus *Non-Tariff Measures* (NTMs). Dalam perdagangan internasional, penerapan NTMs merupakan praktik yang normal dan sah sebagai instrumen kebijakan domestik untuk melindungi kesehatan masyarakat, keamanan pangan, serta nilai sosial-keagamaan. Pemerintah perlu menegaskan bahwa NTMs yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO berbasis sains, tidak diskriminatif, dan proporsional sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai hambatan perdagangan yang tidak sah. Sebagai alternatif, Indonesia sebaiknya mendorong pendekatan yang lebih seimbang, seperti harmonisasi standar dan *mutual recognition* dengan mitra dagang. Di saat yang sama, penguatan transparansi regulasi dan kapasitas pengawasan teknis termasuk audit, inspeksi, dan sistem pelacakan digital perlu terus diperkuat agar implementasi NTMs berjalan konsisten, kredibel, dan akuntabel.

Kedua. Negosiasi sebaiknya difokuskan untuk menghasilkan kompensasi berupa investasi yang memperkuat kepentingan nasional dan mendorong perbaikan dan *fairness* iklim investasi di dalam negeri. Pendekatan ini lebih strategis dibanding hanya menawarkan penurunan tarif ekspor atau mengandalkan renegotiasi kewajiban dagang yang sering kali hanya memberi keuntungan jangka pendek, dan tidak menjamin pendalaman industri manufaktur domestik. Sebaliknya, model negosiasi berbasis investasi memungkinkan Indonesia menuntut syarat-syarat yang berpihak pada penguatan struktur industri nasional, seperti kewajiban penggunaan komponen lokal (TKDN), pelatihan tenaga kerja dalam negeri, dan kolaborasi riset dengan peneliti dari berbagai universitas di dalam negeri.

Dalam konteks ini, kewajiban TKDN sebaiknya tidak dihapus sebagai bagian dari paket deregulasi. Sebaliknya, TKDN perlu dipertahankan sebagai **instrumen strategis untuk memastikan bahwa investasi asing benar-benar menciptakan nilai tambah dan mendorong *transfer knowledge* untuk kemandirian industri dalam negeri.** Penghapusan TKDN justru akan melemahkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dagang, karena investasi yang masuk bisa terjadi tanpa kontribusi nyata terhadap basis produksi domestik. Selain itu, TKDN tidak harus dilihat sebagai hambatan perdagangan, melainkan dapat dirancang secara adaptif misalnya dengan fleksibilitas sektoral, insentif bagi investor yang melampaui target, dan skema sertifikasi yang efisien.

Ketiga, Pemerintah perlu kembali fokus pada swasembada pangan dan menjaga ekosistem usaha tani dalam negeri. Dalam jangka pendek, perlu disiapkan kebijakan fiskal untuk melindungi pasar petani dari gempuran impor, terutama kedelai dan jagung dari AS. Langkah awalnya adalah memetakan distribusi komoditas jagung dan kedelai, mengidentifikasi sentra produksi dan wilayah penyerap utama, agar konsumen tidak beralih ke produk impor.

Pemerintah dapat menciptakan **captive market** untuk produk lokal melalui alokasi anggaran swasembada pangan. Kebijakan ini perlu didukung dengan meningkatkan efisiensi produksi, seperti penyediaan benih unggul dan perbaikan irigasi. Insentif juga bisa diberikan kepada industri pakan ternak, makanan, dan non-makanan yang menyerap produk petani lokal. Tahap berikutnya, pemerintah perlu memperbaiki tata niaga komoditas pangan agar pasar domestik tumbuh tanpa membebani fiskal. Regulasi harus memberi insentif tidak hanya kepada petani, tapi juga kepada distributor, pedagang eceran, dan pelaku rantai pasok lainnya yang memegang peran penting dalam distribusi hasil tani.

Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah perlu merevitalisasi pusat pengembangan benih di berbagai daerah. Tujuannya adalah menghasilkan bibit unggul untuk 15 juta petani tanaman pangan. Ini mencakup pengembangan awal bibit rekayasa genetika (terutama jagung dan kedelai) melalui alokasi anggaran ketahanan pangan. Ke depan, pemerintah dapat menggandeng investor swasta untuk mempercepat pengembangan benih unggulan. Selain itu, revitalisasi irigasi kecil dan menengah di pedesaan juga menjadi prioritas penting guna mendukung produktivitas dan keberlanjutan usaha tani lokal.

Keempat. Mempersiapkan kebijakan strategi untuk kompensasi diplomatik. Seperti telah disampaikan dalam [COREInsight](#) sebelumnya, pemberian preferensi tarif oleh Indonesia kepada Amerika Serikat berisiko memicu gugatan atas pelanggaran prinsip *Most-Favored Nation* (MFN) dari negara mitra dagang Indonesia yang lain. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah perlu menyiapkan kompensasi non-tarif berupa insentif strategis, misalnya kuota investasi di sektor prioritas atau kerja sama teknologi guna memperoleh jaminan informal agar negara-negara mitra dagang Indonesia tidak mengajukan keberatan resmi ke WTO. Strategi ini juga dapat diperkuat melalui pemanfaatan ketentuan kompensasi dalam aturan WTO serta dukungan kolektif di forum kawasan, seperti ASEAN+3, agar risiko konflik bilateral tidak berkembang menjadi sengketa multilateral.

Pelaksanaan strategi ini dapat dimulai dengan pemetaan negara-negara mitra yang paling terdampak oleh peralihan perdagangan, menggunakan permodelan ekonomi. Selanjutnya, pemerintah dapat melakukan pendekatan informal melalui jalur diplomatik, baik melalui kedutaan besar maupun kementerian terkait, untuk menawarkan skema kompensasi yang sesuai dengan kepentingan masing-masing negara. Penyusunan nota kesepahaman (MoU) yang mencantumkan insentif spesifik dapat disertai dengan kesepakatan non-oposisi terhadap kebijakan tarif Indonesia.

Strategi ini juga perlu dikomunikasikan dalam forum regional seperti ASEAN+3 untuk membangun dukungan bersama dan menciptakan persepsi kolektif atas manfaat kebijakan tersebut. Di tahap selanjutnya, pemerintah perlu terus memantau perkembangan di WTO dan menyiapkan opsi kompensasi tambahan jika muncul potensi keberatan dari negara mitra.

Kelima. Pemerintah perlu menyiapkan program bantuan terfokus untuk ekspor manufaktur yang paling rentan. Langkah praktis meliputi perluasan akses kredit lunak melalui bank BUMN, mempercepat program diversifikasi pasar melalui *trade mission* yang lebih intensif, dan memperluas program hibah untuk adopsi teknologi. Selain itu, sistem pengawasan sederhana perlu dibentuk dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada di BPS, Kemendag, dan Bea Cukai. Indikator utama yang dipantau meliputi volume ekspor ke AS per sektor, tingkat utilisasi kapasitas industri, dan volume impor dari negara yang melakukan *trade diversion*.

Catatan:

Angka-angka estimasi yang disampaikan di dalam analisis ini didapat dengan menggunakan model keseimbangan umum antar-negara, yakni *Global Trade Analysis Project* (GTAP) model dengan menggunakan tarif resiprokal yang dirilis oleh Gedung Putih per 16 Juli 2025.

Narahubung Publikasi dan Kerja Sama

📞 Emma Efidayanti
0813-1408-0397



Tariffs

PENANGGUNG JAWAB

Mohammad Faisal, Ph.D

PENASIHAT

Akhmad Akbar Susamto, Ph.D

Prof. Dr. Sahara, S.P., M.Si.

Dr. Etika Karyani

Muhammad Ishak Razak, M.A

PENULIS

Yusuf Rendy Manilet, M.Ec.Dev

Azhar Syahida, MIntDevEc

Eliza Mardian, S.P.,M.S.P

Lailatun Nikmah

DESAIN DAN PUBLIKASI

Agus Priyanto

Nando Purnama Aji

